

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristya, R. (2018). Pengertian Stakeholder dan Contohnya, Fungsi, Jenis Stakeholder Pada Perusahaan.
- Azka, N. (2013). Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013, *2*(4), 171–179.
- Bajoga, U., Lewis, S., Mcneill, A., & Szatkowski, L. (2011). Does the introduction of comprehensive smoke-free legislation lead to a decrease in population smoking prevalence? *1360-0443.2011.03446.x*
- Bajoga, U., Lewis, S., Mcneill, A., & Szatkowski, L. (2011). Does the introduction of comprehensive smoke-free legislation lead to a decrease in , 1346–1354. <https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2011.03446.x>
- Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, K. K. R. (2017). Pertemuan Aliansi Bupati/Walkota Peduli Kawasan Tanpa Tembakau. Retrieved September 30, 2018, from <http://www.padk.kemkes.go.id/news/read/index/1/199/pertemuan-aliansi-bupatiwalkota-peduli-kawasan-tanpa-tembakau>
- Boyle, P., Gray, N., Henningfield, J., Seffrin, J., & Zatonski, W. 2004. *Tobacco and Public Health : Science and Policy*. New York : Oxford University Press.
- Cahn, W. Z., et al. (2018). *The Tobacco Atlas Sixt Edition*.
- Chakraborty, K. Balanda, U Perry, Z. K. (2018). *9th European Public Health Conference: Parallel Sessions*.
- Debora, Y. (2017). Rokok Merugikan Ekonomi Global (WHO).
- Eriksen, M., Mackay, J., Schluger, N., Gomeshtapeh, F., I. & Drope, J. 2015, *The Tobacco Atlas. Fifth Ed*. USA : American Cancer Society, Inc.
- Ewles, L., & Simnett, I. 1994. *Promosi Kesehatan : Petunjuk Praktis*. Edisi

Kedua. Terjemahan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Gafar, A. (2016). Evaluasi Proses Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang Panjang Sumatera Barat.

Graham, R., G. & Martin, G., I. 2012. Health Behavior A Darwinian Reconceptualization. *Am J Prew Med. Vol. 43(4). Page 451-455*

Global Adult Tobacco Survey. (2016). Global Adult Tobacco, 6–9.

Humas Biro Umum Kementerian Kesehatan RI. (2018). PP No. 81 Tahun 1999 tentang “Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan” Akan Di Revisi, (81), 20–21. Retrieved from [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id)

Jane. (2010). Otonomi Bidang Kesehatan yang Setengah Hati, *12(10)*, 363–372.

Kaufman, M. R., *et al.* (2015). “ Excuse me , sir . Please don ’ t smoke here ’ . A qualitative study of social enforcement of smoke-free policies in Indonesia, (September 2014). <https://doi.org/10.1093/heapol/czu103>

Keller, R., Kaltborn, R., P., Krebs, H., Hornung, R. 2005. Exposure to and Annoyance with Second-hand Smoke in Switzerland: Result of the Tobacco Monitoring Survey. *International Comparison of Helath Soz.-Praventivmed. Vol. 50. Page : 370-377.*

Kementerian Kesehatan RI. (2009). Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

Kementerian Kesehatan RI. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan.*

Kementerian Kesehatan RI. (2016). Laporan Survei Indikator Keseharan (Sirkesnas) 2016.

Kementerian Kesehatan RI. (2017). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat warta KESMAS. *Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.*

- Khan, D. (2015). Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi PP nomor 109 Tahun 2012 (Kemenkes).
- Mardiah, A. 2011. *Dukungan Stakeholder terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus Terpadu Politeknik Kesehatan kemenkes Nangroe Aceh Darussalam*. Tesis. Yogyakarta : Univeritas Gadjah Mada.
- Maulana, R. (2015). Kebijakan Publik : Sebuah Konsep.
- Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 188/Menkes/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (2011).
- Minardi, V., *et al.* (2014). Compliance with the smoking ban in Italy 8 years after its application, 549–554. <https://doi.org/10.1007/s00038-014-0543-0>
- Moertiningsih, S. (2013). Pengendalian Tembakau dan Masalahnya di Indonesia.
- Nugraha, G. A. (2017). 5 Tahap-Tahap Kebijakan Publik dan Pelaksanaannya.
- Popa, S., I. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Kawasan Larangan merokok Terhadap Perilaku Merokok Pegawai pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo*. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Rahajeng, E. (2015). Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali.
- Sam, H. (2018). “Stakeholder” Pengertian Menurut Para Ahli & ( Contoh – Hubungan – Macam ).
- Sherriff, N., S. & Coleman, L.2013. Understanding the Needs of Smokers Who Work as Routine and Manual Workers on Building Sites : Results from A Qualitative Study on Workplace Smoking Cessation. *Public Health. Vol.127. Page 125-133*
- Sekretaris Negara RI. (2003). Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013

### Tentang Pengaman Rokok Bagi Kesehatan.

Sekretaris Negara RI. (2009). Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Varvasovszky, Z. (2000). A Stakeholder Analysis, *15*(3), 338–345.

Walt, G. (1996). *Health Policy: An Introduction to Process and Power*. Zed Book.

Walt, G., & Gilson, L. (1995). Reforming the Health Sector in Developing Countries: The Central Role of Policy Analysis. *Health policy and Planning*.

WHO. (2005). framework convention on tobacco control.

Ye, X., *et al.* (2015). Smoking behaviors before and after implementation of a smoke-free legislation in Guangzhou , China. *BMC Public Health*, 1–8.  
<https://doi.org/10.1186/s12889-015-2353-6>